

KEPASTIAN HUKUM GADAI SWASTA DALAM REGULASI USAHA PERGADAIAN DI INDONESIA

Oleh :

Debby Andi Maria* dan Ninik Darmini**

INTISARI

Tujuan penelitian dari penulisan hukum yang berjudul Kepastian Hukum Gadai Swasta Dalam Regulasi Usaha Pergadaian Di Indonesia adalah untuk mengetahui kepastian hukum gadai swasta dalam regulasi usaha pergadaian di Indonesia dan urgensi peraturan Usaha Pergadaian Swasta di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pergadaian Swasta sudah memiliki kepastian hukum dalam hukum jaminan di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, namun kondisi Pergadaian Swasta yang ada di Indonesia saat ini masih banyak yang menyimpang dari sistem hukum jaminan. Penyimpangan tersebut menimbulkan urgensi peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan tepat untuk Usaha Pergadaian Swasta di Indonesia.

Kata Kunci: Pergadain Swasta, Sistem Hukum Jaminan, Otoritas Jasa Keuangan

* Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

** Dosen Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

KEPASTIAN HUKUM GADAI SWASTA DALAM REGULASI USAHA PERGADAIAN DI INDONESIA

By :

Debby Andi Maria* dan Ninik Darmini**

ABSTRACT

The aim of the study of writing a law entitled Kepastian Hukum Gadai Swasta Dalam Regulasi Usaha Pergadaian Di Indonesia is to find out the position of the Private Pawnshop Businesses in the guarantee law system in Indonesia and the urgency of regulations in the guarantee law system on Private Pawnshop Businesses in Indonesia.

The method used in this study is Normative Juridical. This research uses descriptive qualitative methods.

Private Pergadaian already has legal certainty in guarantee law in Indonesia through the Financial Services Authority Regulation Number 31 / POJK.05 / 2016 on Mortgage Business, but the condition of Private Pergadaian in Indonesia today is still many that deviate from the guarantee legal system. These deviations have led to the urgency of firmer and more appropriate laws and regulations for the Indonesian Private Business Entity.

Keywords: Private Pownshop, Guarantee Legal System, Financial Services Authority

* Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

** Dosen Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta